



Pemkot Yogya Kejar Setoran PBB

YOGYA, TRIBUN - Guna mencapai target pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta akan kembali melakukan jemput bola pembayaran PBB. Loket a-

kan dibuka selama satu bulan penuh pada September mendatang.

Kepala Seksi Pembinaan dan Pelaporan DPDPK Kota Yogyakarta, Santoso mengatakan pihaknya akan bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY untuk pembayaran PBB tersebut. Saat ini terdapat 92.051 wajib pajak PBB yang terdaftar di Kota Yogyakarta. Sementara target realisasi pembayaran PBB mencapai Rp48

miliar.

"Hingga Juli 2015, sudah terealisasi 41,34 persen atau Rp19,8 miliar. Ini artinya masih ada kekurangan sekitar Rp28 miliar," kata Santoso, Jumat (7/8).

Kekurangan ini, imbuhnya, optimistis bisa diraih pada bulan September. Sebab pada bulan tersebut sudah masuk jangka jatuh tempo pada 30 September. DPDPK pun optimistis bisa meraup sekitar Rp25 miliar di masa jelang jatuh tempo. Se-

bab kecenderungan wajib pajak banyak membayar mendekati jatuh tempo.

Kecamatan pertama yang akan didatangi oleh DPDPK Kota Yogyakarta adalah Kecamatan Merangsan dan pada hari terakhir tanggal 30 September 2015 di Kecamatan Gondomanan.

"Meski berpindah-pindah, namun warga di luar kecamatan setempat yang sedang kami datangi, tetap bisa ikut membayar. Kare-

■ Bersambung ke Hal 14

Pemkot Kejar

Sambungan Hal. 13

na datanya sudah kami kelola secara *online*," jelasnya.

Wajib pajak yang masih menunggak pembayaran PBB, pun tak luput dari sasaran DPDPK Kota Yogyakarta. DPDPK pun akan memberikan waktu tersendiri untuk pembayaran tunggakan PBB. Hingga akhir Juli 2015 total ada sekitar 5 ribu wajib pajak yang masih menunggak PBB dengan total Rp677 juta.

Menurut Santoso, bahkan masih ada wajib pajak yang menunggak pembayaran PBB sejak tahun 1994. Meski sudah sangat lama, namun tetap memiliki

kewajiban untuk membayar PBB.

"Data tunggakan juga bisa diakses secara *online*. Dengan sistem ini, diharapkan kesadaran para wajib pajak yang menunggak bisa semakin tinggi. Karena semakin telat membayar, semakin tinggi pula dendanya. Ada mekanisme denda yang dihitung setiap bulan," kata Santoso.

Namun demikian, komitmen wajib pajak PBB di Kota Yogyakarta masih cukup tinggi. Mendekati masa jatuh tempo, makin banyak wajib pajak yang menunaikan kewajibannya. (tiq)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005